

# Analisis Stakeholder dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten

Muzakar Isa<sup>1\*</sup>, Liana Mangifera<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta

\*Email: muzakar.isa@ums.ac.id

---

## Abstrak

**Keywords:**  
*Pengurangan Risiko, Banjir; Kerentanan, Stakeholders*

*Kabupaten Klaten memiliki risiko banjir yang tinggi. Berbagai upaya pengurangan risiko banjir telah dilakukan oleh berbagai stakeholders tetapi hasilnya belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serta stakeholders dalam pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini masyarakat yang berada di daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten. Penentuan sampel menggunakan metode purposif sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur. Analisis data menggunakan adalah penyusunan indeks, analisis stakeholder dengan program MACTOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 stakeholder dalam pengurangan risiko banjir ini. Mereka memiliki 6 kepentingan yang berbeda beda, yaitu income, lingkungan, pembangunan daerah dan keselamatan jiwa. Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten, BPBD mempunyai peran sentral bersama dengan Kepala Desa setempat dan relawan (masyarakat). Sedangkan perguruan tinggi merupakan aktor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan risiko banjir ini.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia berada pada peringkat 6 sebagai Negara rawan banjir di dunia [3]. Selama tahun 1815-2015 Indonesia mengalami banjir sebanyak 5.903 kali atau sebesar 36,94% dari total bencana alam yang terjadi di Indonesia [2]. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi rawan banjir dengan kategori tinggi [1]. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kabupaten yang rawan banjir adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati dan Kabupaten Klaten [2].

Kabupaten Klaten selama tahun 2011-2015 mengalami 20 kali banjir. Banjir tersebut memiliki risiko yang tidak sedikit, yaitu 1 orang meninggal dunia, 2.094 orang

mengungsi, 7 rumah rusak berat dan 605 ha lahan mengalami kerusakan [2].

Swart dan Frank (2007), dan Dam (2010) menjelaskan bahwa risiko banjir dipengaruhi oleh ancaman bahaya (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*). McEntire (2012) menjelaskan kerentanan merupakan kondisi yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman banjir. Kerentanan disebutkan sebagai penentu utama timbulnya risiko banjir, karena *hazard* tidak dapat menyebabkan risiko banjir kecuali berinteraksi dengan fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang rentan. *Hazard* juga tidak dapat dihilangkan, akan tetapi masyarakat dan sumberdaya yang ada dapat

menentukan tinggi rendahnya tingkat kerentanan.

Risiko banjir di Kabupaten Klaten dapat dikurangi melalui kerjasama antar stakeholders terkait. Permasalahannya adalah belum ada analisis yang meneliti siapa saja sebenarnya stakeholders yang terlibat dalam pengurangan risiko banjir ini. Selain itu, setiap *stakeholders* pasti memiliki kepentingan yang berbeda beda sehingga perlu ada upaya konsolidasi antar *stakeholders* terkait. Dengan ini dapat dikatakan bahwa belum kelembagaan yang tepat dalam mengurangi risiko banjir di kabupaten Klaten.

Risiko banjir harus dikurangi karena risiko yang tinggi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah dan *stakeholders* terkait harus secara bersama sama mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dapat dicapai melalui kondisi wilayah dan masyarakat yang kondusif. Salah satu kondisi wilayah dan masyarakat yang kondusif adalah kemampuan masyarakat mengatasi bencana (banjir). Isa menjelaskan frekuensi banjir berpengaruh terhadap risiko banjir. Ketika ada banjir, terjadi banyak kerusakan factor produksi yang berpengaruh banyak pada kerusakan dan kerugian sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi [3].

Pengurangan risiko banjir harus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Secara teori, risiko banjir merupakan fungsi dari hazard dan kerentanan. Untuk itu dalam rangka mengurangi risiko banjir, harus dilakukan pengurangan kerentanan melalui peran serta *stakeholders* terkait.

Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis peran serta *stakeholders* dalam

pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah mengalami banjir di Kabupaten Klaten. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan observasi dan indepth interview. Analisis data menggunakan analisis stakeholder dengan program MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Wilayah

Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak diantara 7°32'19" sampai 7°41'8"33" Lintang Selatan dan 110°26'14" sampai 110°47'51" Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Barat.

Secara administrasi, Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran, yaitu Dataran Lereng Merapi, Dataran Gunung Kapur dan Dataran Rendah. Dataran Lereng Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. Dataran Gunung Kapur membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan

Bayat dan Cawas. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten kecuali sebagian kecil wilayah yang merupakan dataran Lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Klaten adalah (1) Kecamatan Bayat; (2) Kecamatan Cawas; (3) Kecamatan Ceper; (4) Kecamatan Gantiwarno; (5) Kecamatan Juwiring; (6) Kecamatan Karangdowo; (7) Kecamatan Pedan; (8) Kecamatan Prambanan; (9) Kecamatan Trucuk; (10) Kecamatan Wedi; dan (11) Kecamatan Wonosari.

### 3.2. Analisis Stakeholders

Penelitian ini melibatkan 16 actor (stakeholder) yang merupakan perwakilan dari pelaku utama pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten. *Stakeholders* tersebut adalah (1) Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda), (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), (3) Dinas Kesehatan (Dinkes), (4) Dinas Pekerjaan Umum (DPU), (5) (LSM 1), (6) LSM 2, (7) Perguruan Tinggi (PT), (8) Camat, (9) Kepala Desa (Kades), (10) Petani (Petani), (11) Pedagang (Pedagang), (12) Tokoh Masyarakat (Relawan 2), (13) Masyarakat (Relawan 1), (14) PMI (PMI), (15) Tim SAR (SAR), dan (16) TNI dan POLRI (TNI-POLRI). *Stakeholders* tersebut memiliki 4 Objectives yaitu pendapatan, lingkungan alam dan buatan, pembangunan daerah dan keselamatan masyarakat.

Gambar 1 (terlampir) menunjukkan bahwa BPBD merupakan *stakeholders* yang mempunyai pengaruh paling tinggi dalam pengurangan risiko banjir di Klaten sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten terlihat bahwa pihak BPBD

mempunyai peran sentral. Selain BPBD, ada dua tokoh utama yang memiliki pengaruh tinggi dalam pengurangan risiko banjir di Klaten yaitu Kepala Desa setempat dan relawan (masyarakat setempat). Disisi lain, perguruan tinggi merupakan actor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan risiko banjir ini.

Selanjutnya actor yang mempunyai tingkat pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi adalah pelaku usaha (petani dan pedagang) sehingga mereka sangat tergantung pada aktor lain. Hal ini berbeda dengan actor lainnya yang memiliki daya saing lebih tinggi sehingga mempunyai potensi risiko yang lebih rendah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa petani dan pedagang merupakan actor korban dari bencana banjir yang terjadi, sedangkan actor lainnya merupakan actor yang memberikan upaya pengurangan risiko banjir.

Scala competitiveness dengan objectives sebagaimana gambar 3 menunjukkan bahwa *objectives* Pendapatan, Lingkungan, Pembangunan daerah dan keselamatan masyarakat mendapatkan respon positif dari semua actor atau menunjukkan bahwa semua aktor setuju terhadap *objectives* ini. Objectives pendapatan memperoleh respon positif dan negative. Secara umum para actor dalam melakukan kegiatan pengurangan risiko banjir ini masih memikirkan pendapatan. Terdapat tidak actor yang tidak memikirkan pendapatan yaitu TNI-POLRI, PMII dan SAR. Berdasarkan 4 objectif yang ada, terdapat 3 obyektif yang memiliki hubungan kuat, yaitu keselamatan masyarakat, lingkungan dan pembangunan daerah. Sedangkan pendapatan merupakan tujuan yang tidak kuat bagi *stakeholders* dalam pengurangan risiko banjir ini.

Convergensi antar aktor sebagaimana gambar 4 (terlampir) pada pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten menunjukkan nilai-nilai yang kuat pada stakeholder Bappelbangda, BPBD, Dinas Kesehatan,

DPU, Camat, Kepala Desa, LSM, Perguruan Tinggi, Relawan, pelaku usaha. Ini berarti semakin sentral posisi keempat aktor tersebut karena memiliki tingkat kepentingan bersama yang tinggi. Stakeholder yang memiliki tingkat konvergensi paling rendah adalah TNI-POLRI, PMII dan SAR. Tingkat konvergensi rendah ini karena tiga actor memiliki keterkaitan dengan salah satu obyektif yang berbeda dengan 13 actor lainnya.

Convergensi actor mengelompok dalam tiga kelompok besar, yaitu kelompok pertama terdiri dari Bappelbangda, BPBD, Dinas Kesehatan, DPU, Camat, Kepala Desa, LSM, Relawan, dan pelaku usaha. Kelompok kedua terdiri atas TNI-POLRI, PMI dan SAR. Kelompok ketiga yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan fenomena yang menarik karena tidak memiliki penruh dalam mitigari banjir.

Gambar 5 (terlampir) menunjukkan bahwa stakeholder yang memiliki potensi divergensi yang tinggi adalah TNI-POLRI, dan SAR dengan relawan (masyarakat). Sementara actor yang potensi divergensinya rendah adalah Bappelbangda, BPBD, Dinas Kesehatan, DPU, Camat, Kepala Desa, LSM, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa Bappelbangda, BPBD, Dinas Kesehatan, DPU, Camat, Kepala Desa, LSM, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha mempunyai kemungkinan konflik yang rendah sehingga bisa menjadi stakeholder sentral dalam proses pengurangan risiko banjir di kabupaten Klaten.

#### 4. KESIMPULAN

Pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten dilakukan oleh 14 stakeholder (actor). Mereka memiliki 6 kepentingan yang berbeda beda, yaitu income, lingkungan, pembangunan daerah dan keselamatan jiwa. Dalam upaya pengurangan risiko banjir ini, BPBD mempunyai peran yang sentral bersama dengan Kepala Desa setempat dan

relawan (masyarakat). Sedangkan perguruan tinggi merupakan actor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan risiko banjir ini

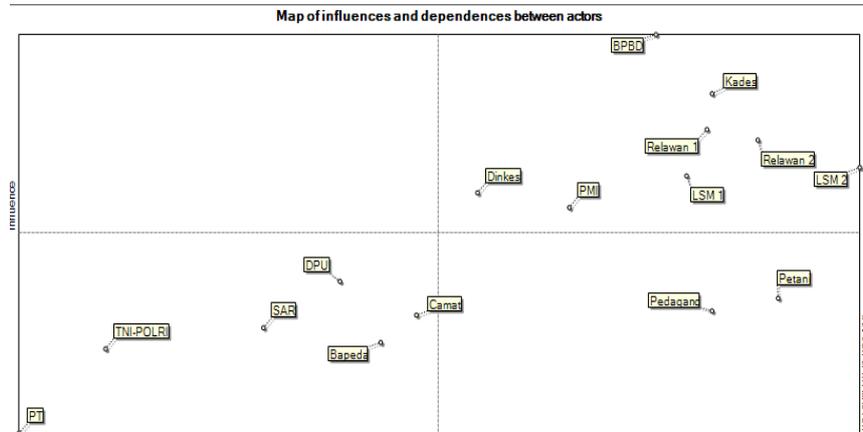
#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta, tim pelaksana dan yang telah membiayai dan berperan aktif dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

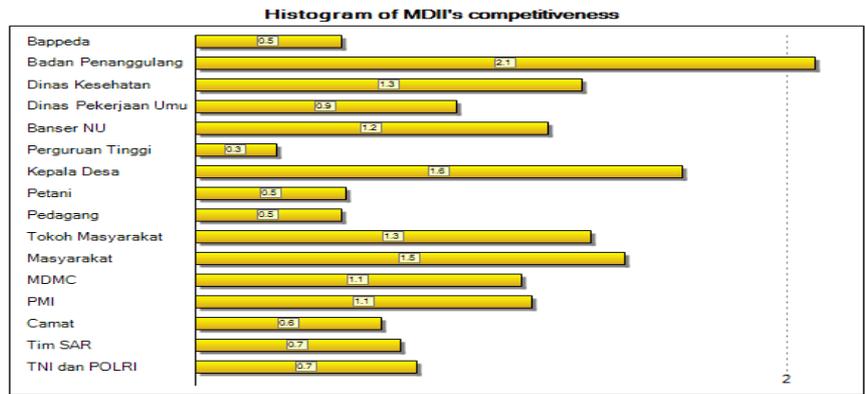
#### REFERENSI

- [1] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Data Informasi Bencana Indonesia*, Jakarta: BNPB. 2014.
- [2] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Data Informasi Bencana Indonesia*, Jakarta: BNPB. 2016.
- [3] Isa, M. Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi?, *The 3rd University Research Colloquium* 2016, Kudus. 2016.

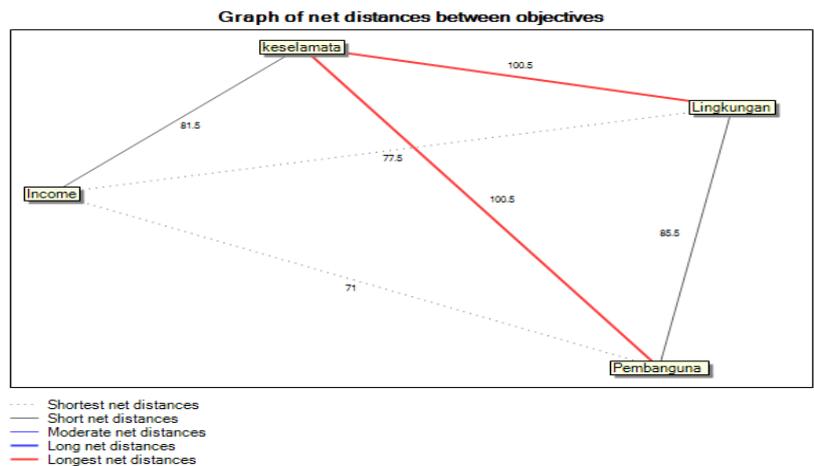
Lampiran



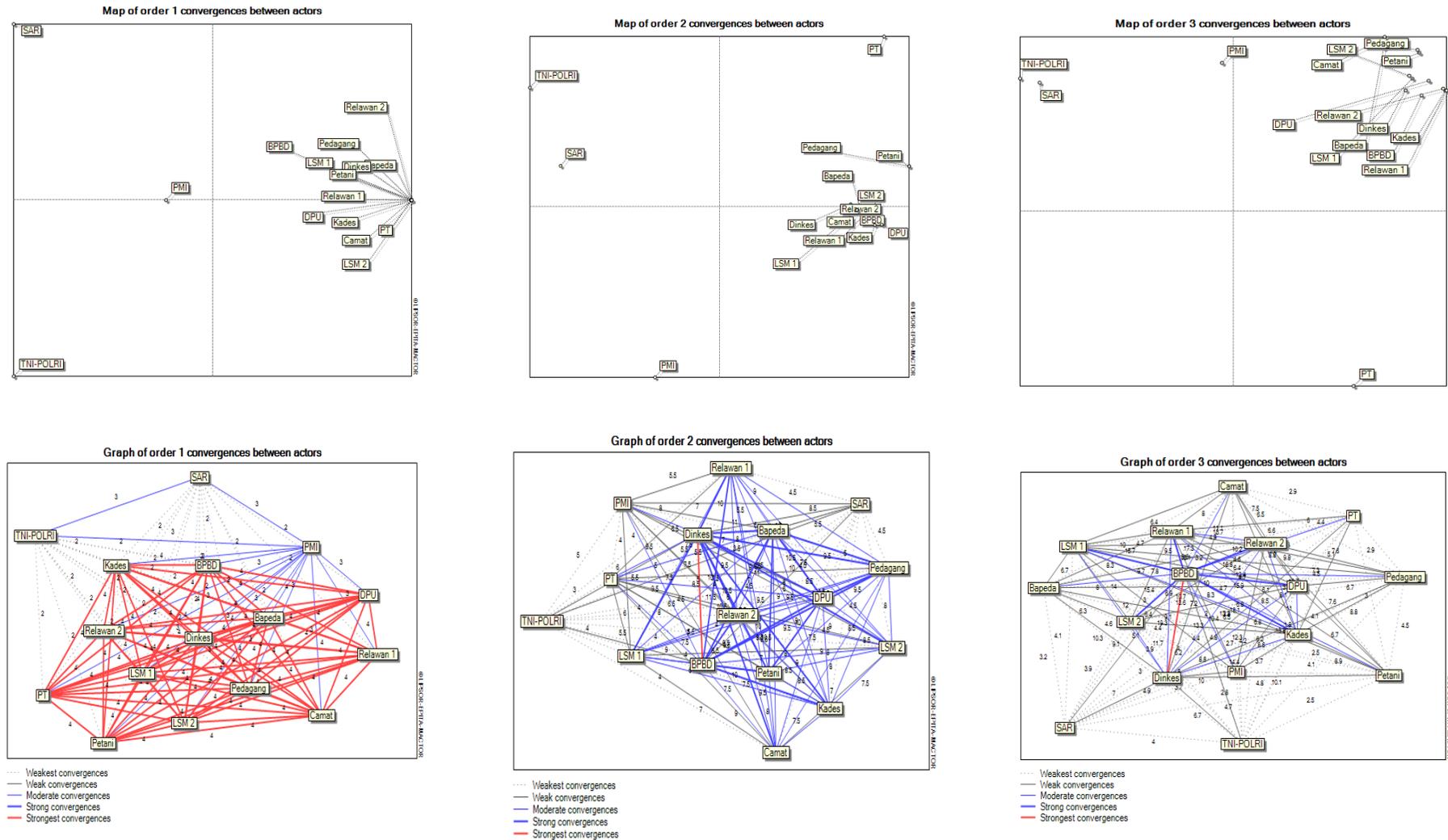
Gambar 1. Gambar Pengaruh Dan Ketergantungan Masing Masing Actor dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten



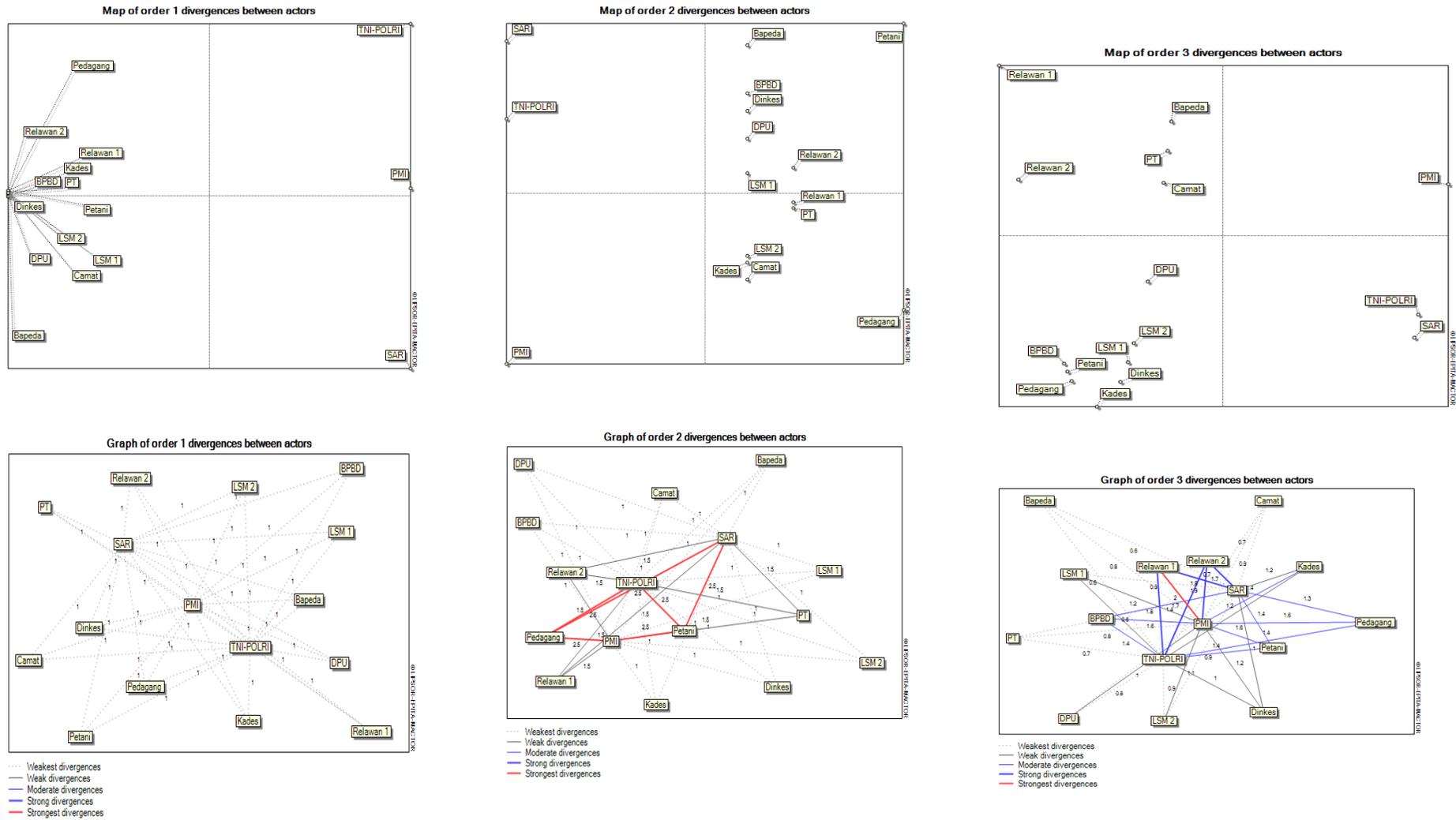
Gambar 2. Daya Saing Masing Masing Actor dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten



Gambar 3. Hubungan Antar Kepentingan Masing Masing Actor dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten



**Gambar 4.** Convergen Antar Actor dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten



**Gambar 5.** Divergen Antar Actor dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten

